

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai inflasi dengan pendekatan Kurva Philips di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah tingkat pengangguran, ekspektasi inflasi, jumlah uang beredar, produk domestik regional bruto dan nilai tukar terhadap inflasi selama 34 tahun terakhir mulai dari tahun 1988 – 2021, dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil estimasi VECM Hubungan trade off dalam jangka pendek tingkat pengangguran dan inflasi di Provinsi Aceh pada priode 1988-2021 terbukti tidak terjadi dan dalam jangka panjang hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi berpengaruh negatif sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa teori Kurva Philips tidak dapat digunakan pada perekonomian di Provinsi Aceh. Sedangkan untuk faktor lain yang mempengaruhi inflasi dalam jangka pendek hanya nilai tukar yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Provinsi Aceh dan dalam jangka panjang ekspektasi inflasi dan jumlah uang beredar juga berpengaruh positif terhadap inflasi di Provinsi Aceh.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka terdapat beberapa pesan yang dapat menjadi rekomendasi yaitu:

1. Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran dan inflasi dalam jangka pendek sehingga dalam dalam

mengambil kebijakan ekonomi di Aceh dalam jangka pendek pemerintah dapat fokus menstabilkan laju inflasi tanpa harus memikirkan dampak pada tingkat pengangguran dan begitu juga sebaliknya.

2. Dalam jangka panjang pemerintah Provinsi Aceh perlu memperhatikan kebijakan dalam menstabilkan inflasi dengan tetap memperhatikan tingkat pengangguran karena diketahui bahwa pada priode 1988-2021 tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap inflasi di Provinsi Aceh.
3. Pemerintah Aceh harus lebih fokus dalam memperbaiki perekonomian dengan berperan langsung dalam menciptakan keseimbangan atau equilibrium hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan pemerintah mendorong kembali posisis permintaan dan penawaran melalui kebijakan belanja dan investasi.
4. Pemerintah Aceh harus lebih memperhatikan dalam membuat sebuah kebijakan sehingga jumlah uang beredar dapat terkendali. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat pajak mengurangi belanja daerah.
5. Pemerintah Aceh dapat fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) tanpa harus khawatir terhadap kenaikan tingkat inflasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat produksi dan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar tersebut bank sentral harus mengambil perannya seperti kebijakan dalam penentuan suku bunga sehingga tingkat inflasi di suatu daerah atau negara tetap stabil.